

Pilpres 2024: Populisme Islam dan Politik Identitas

Tumpal Daniel S
Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika
Email : tumpaldaniels@gmail.com

ABSTRAK

Menjaga keutuhan dan persatuan berbangsa dan bernegara merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Arus partisipasi dan kebebasan politik yang tinggi dapat menyebabkan munculnya berbagai distorsi dan paradoks yang menimbulkan kekhawatiran. Kondisi ini terjadi karena, seiring dengan meningkatnya partisipasi politik dan kebebasan yang berakibat peningkatan polarisasi politik. Penguatan kecenderungan populisme agama dan penggunaan isu politik identitas dalam kontestasi elektoral sudah berulang terjadi pada pemilu di Indonesia. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian sangat sulit dikendalikan, terlebih bila menggunakan label agama yang memicu keterbelahan pada masyarakat. Pilpres 2024 akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia dalam menghadapi populisme agama dan isu-isu politik identitas. Keduanya dapat menjadi ancaman bagi praktik demokrasi yang sehat, karena dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik berkepanjangan. Dibutuhkan kearifan untuk upaya antisipasi dan pencegahan populisme agama dan politik identitas oleh semua komponen bangsa. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Kata Kunci : Pilpres, Populisme Islam, Politik Identitas

ABSTRACT

Maintaining the integrity and unity of the nation and state is a non-negotiable need. The flow of high political participation and freedom can lead to the emergence of various distortions and paradoxes that raise concerns. This condition occurs because, along with increasing political participation and freedom, this results in increased political polarization. The strengthening of religious populism tendencies and the use of identity politics issues in electoral contestation has repeatedly occurred in elections in Indonesia. The spread of fake news and hate speech is very difficult to control, especially when using religious labels that trigger division in society. The 2024 presidential election will be a test for Indonesian democracy in facing religious populism and issues of identity politics. Both can be a threat to healthy democratic practices, because they can divide society and trigger prolonged conflict. Wisdom is needed to anticipate and prevent religious populism and identity politics by all components of the nation. This article uses research methods with a qualitative approach to produce descriptive data.

Keywords : Presidential Elections, Islamic Populism, Identity Politics

Pendahuluan

Pemilu tahun 2024 sudah memasuki masa kampanye dan segera berakhir. Sejak KPU mengeluarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU menetapkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal

14 Februari 2024 secara serentak. Sementara itu, untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Seluruh jabatan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan akan dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum 2024 akan menjadi penentu nasib bangsa kedepan. Pertama, pemilu ini akan menentukan apakah Indonesia akan lebih kuat,bersatu dan maju . Kedua, akan menentukan juga apakah demokrasi Indonesia lebih dewasa dan berkembang. Atau sebaliknya,mengingat Pemilu 2019 masih meninggalkan luka yang mendalam. Polarisasi dan konflik sosial belum sembuh betul, ancaman keterbelahan di antara anak bangsa masih menjadi ingatan kolektif dan dapat meledak kapan saja terlebih dalam situasi pemilu berlangsung head to head dan muncul populisme menggunakan isu-isu politik identitas yang sengaja dirawat oleh yang berkepentingan untuk tujuan elektoral semata.

Pasca Reformasi dinamika populisme dan politik identitas jauh lebih beragam. (Mahpudin, 2021) menyoroti kebangkitan politik identitas dalam proses demokratisasi pasca Orde Baru.Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan media sosial telah mempercepat penyebaran dan pengaruh untuk berekspresi. Populisme berbasis etnis dan agama setidaknya terbaca dari hasil penelitian (I Putu Sastra Wingarta et al., 2022) yang mengeksplorasi pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis tentang politik identitas. Politik identitas pasca-reformasi telah menjadi lebih menonjol, khususnya dalam konteks pemilihan umum, di mana identitas etnis dan agama sering kali dijadikan alat untuk menggalang dukungan politik.

Kemunculan media sosial dan platform digital juga turut memengaruhi perkembangan politik identitas di era pasca-reformasi. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi dan penyebaran semangat populisme dan narasi identitas, yang tidak jarang memperkuat polarisasi dan memperdalam perbedaan. Hal ini terasa signifikan di kota-kota besar di mana akses ke teknologi informasi relatif lebih tinggi.(Rayu Mega Permatasari, 2022).

Metodologi

Beberapa jurnal dan artikel sebagai perbandingan dengan artikel ini. **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Juhana Nasrudin (2018), dengan judul ‘Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)’.Peneliti mengatakan Identitas dan representasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Sementara agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan representasi dari manusia. **Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Aldho Faruqi Tutukansa (2022), dengan judul penelitian ‘Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia’. Mengatakan isu politik identitas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini kerap terjadi ketika diadakannya kontestasi politik di Indonesia, seperti pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan seperti ini kemudian membuat konsep identitas sosial yang berdampak dengan multikulturalisme hingga politik di Indonesia mulai mengalami persinggungan yang menimbulkan berbagai aspek yang dinilai bertolak belakang. **Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Andre Pebrian Perdana (2023) dengan judul ‘Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang’. Hasilnya disimpulkan politik identitas seringkali disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan. Memang, kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok (in group unity).

Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, menonjolkan identitas kelompok secara berlebihan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa (*nation unity*). Disinilah pembeda antara politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama. Pendekatan dalam penulisan artikel ini untuk lebih mendalami populisme dan politik identitas pada pemilu 2024. Penulis menggunakan metode yang dinilai tepat yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Bagdon dan Taylor ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian dalam mendeskripsikan sebuah fenomena ataupun pengalaman berdasarkan sudut pandang dengan menemukan realitas yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks Pilpres 2024; Identitas dan Populisme Islam.

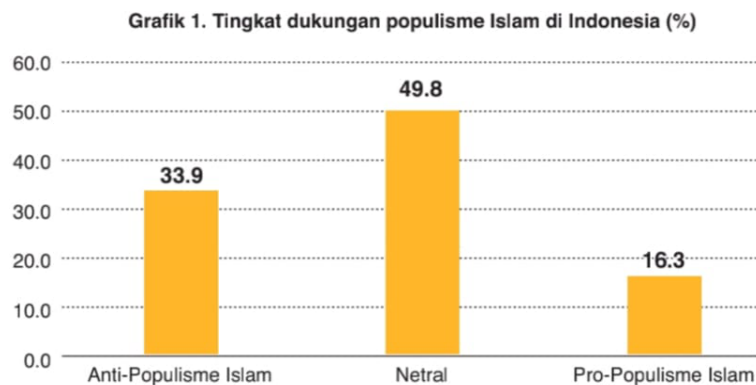
Populisme Islam

Burhanuddin Muhtadi peneliti senior pada Indikator Politik Indonesia menyatakan, kita menyaksikan tren menguatnya sentimen populisme global yang berlandaskan sentimen keagamaan, seperti kasus populisme Hindu di India dan populisme Islam di Turki dan Indonesia. Aktor populis, termasuk aktor yang menyebarkan populisme Islam, umumnya memisahkan masyarakat ke dalam dua kelompok yang antagonistik dan homogen, rakyat yang suci versus elite yang korup. Memang benar bahwa beberapa ideologi yang lain juga mendasarkan pada pertentangan antara rakyat dan elite. Namun, perbedaannya jika dalam sosialisme pertentangan tersebut didasarkan konsep kelas sosial, dalam ideologi populisme pertentangan terhadap kelompok elite selalu dibalut dengan retorika moralitas. 'rakyat biasa' dianggap lebih bermoral karena mewakili kehendak umum, sedangkan elite dianggap sebagai kelompok tidak bermoral. Narasi aktor dan kelompok populis Islam di Indonesia mengadopsi strategi serupa yang dilakukan aktor populis agama di negara lain.

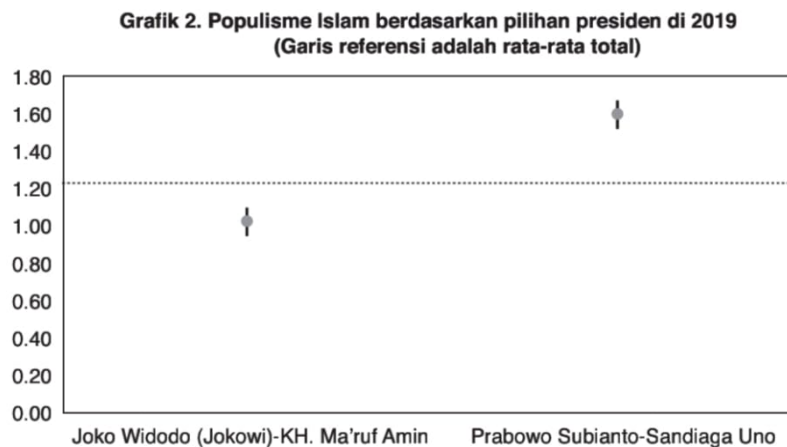
Di Turki, AKP telah berhasil memimpin aliansi lintas kelas dan mengeksploitasi sentimen kebencian dan marginalisasi umat muslim di Turki, yang telah lama ditindas kelompok elite sekuler Kemalis. Di Indonesia, narasi serupa tentang ketidakadilan sosial-ekonomi yang timbul dari marginalisasi rakyat biasa, diperkuat sejarah ketegangan rasial, agama, serta kelas sosial yang sejak dulu ada dan diperkuat keberadaan minoritas (khususnya etnik Tionghoa yang dipersepsikan menguasai kehidupan ekonomi di negara ini). Berapa besar tingkat dukungan publik terhadap populisme Islam di Indonesia? Seberapa signifikan mereka dalam memengaruhi peta Pemilu 2024?

Populisme Islam di Indonesia Dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Februari 2020, kami memakai kerangka teoretis Marcus Mietzner (2020) untuk mengukur tingkat sentimen populisme Islam dengan menanyakan tingkat persetujuan responden terhadap tiga pernyataan berikut dalam skala Likert (1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju, 5= sangat setuju). Pertama, umat Islam di Indonesia harus mendapat perlakuan istimewa jika dibandingkan dengan kelompok agama lain. Kedua, orang Tionghoa di Indonesia seharusnya memiliki hak lebih sedikit ketimbang umat muslim. Ketiga, Indonesia harus diatur sesuai dengan hukum syariat Islam. Grafik 1. Tingkat dukungan populisme Islam di Indonesia (%). Untuk menentukan tingkat populisme Islam di

Indonesia, kami menyusun indeks yang dikembangkan dari jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Skor antara 66,6668 dan 100 (yakni jika seorang responden menjawab setuju semua pertanyaan atau hampir semua pertanyaan) dikategorikan ke dalam kelompok propopulisme Islam; skor antara 33,3334 dan 66,6667 menunjukkan kategori netral, dan skor antara 0 dan 33,3333 menunjukkan kategorisasi antipopulisme Islam. Grafik 1 menunjukkan, 16,3% penduduk Indonesia pada 2020 dapat dikategorikan sebagai bagian kelompok pendukung populisme Islam, sedangkan 33,9% merupakan bagian kelompok antipopulisme Islam. Mayoritas sebanyak 49,8% merupakan kelompok netral. Meskipun dari sisi persentase pendukung populisme Islam lebih kecil, kelompok ini relatif lebih aktif dan militan dalam hal memobilisasi massa.



Hal ini terlihat dalam Aksi Bela Islam 212, yang berujung pada kesuksesan dalam menjungkalkan gubernur petahana Basuki Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI 2017, yang berawal mula dari kasus penistaan agama yang berhasil dikapitalisasi aktor populis islamis. Populisme Islam dan Pilpres 2019 Setelah kita menetapkan berapa proporsi pendukung populisme Islam, kami ingin melihat hubungan populisme Islam dan Pilpres 2019, dengan membandingkan skor rata-rata pada skala propopulisme Islam dengan dukungan mereka di 2019. Grafik 2 menunjukkan, skor rata-rata dan interval kepercayaan (>95%) pada Pilpres 2019, dalam skala populisme Islam. Jika interval kepercayaan tidak menyentuh garis referensi, hubungan antara sikap propopulisme Islam dan pilihan presiden secara statistik signifikan pada tingkat 5%. Kami menemukan pendukung Prabowo cenderung memiliki sikap dukungan lebih tinggi terhadap populisme Islam. Sebaliknya, pendukung Jokowi cenderung kurang mendukung populisme Islam. Mengapa pendukung Prabowo cenderung propopulisme Islam? Padahal, secara latar belakang pribadi dan ideologis, Prabowo tidak punya pandangan yang dekat dengan kelompok islamis. Prabowo justru berasal dari keluarga berlatar belakang sekuler dan pluralis. Namun, sejak 2014, Prabowo secara taktis menggunakan isu Islam dan berkoalisi dengan ormas Islam untuk mengalahkan Jokowi. Pendukung Prabowo sering menyebarkan di media sosial bahwa Jokowi ialah seorang Kristen, komunis, dan antek Tiongkok. Pada 2016, Prabowo sukses mengusung Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta melawan Ahok, dengan menggalang dukungan penuh dari semua kelompok Islam. Pada 2019, ia kembali menggunakan isu agama dan menggalang dukungan kelompok-kelompok Islam. Bahkan, dalam skala yang lebih besar ketimbang 2014.

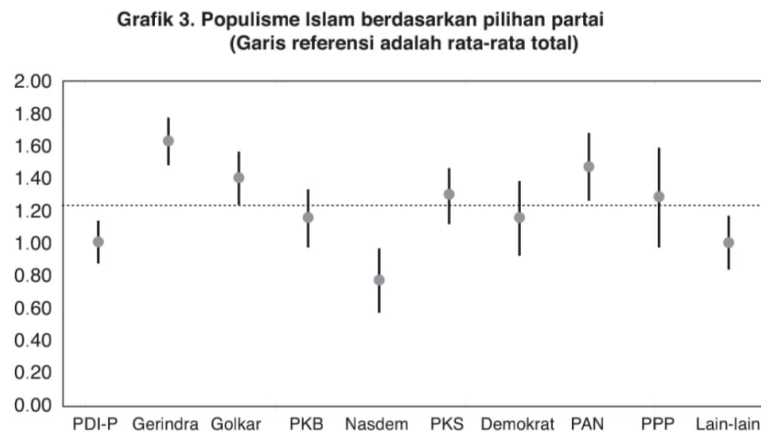


Grafik 2. Populisme Islam berdasarkan pilihan presiden di 2019 (Garis referensi ialah rata-rata total).

Blok pemilih Islam populis ini meskipun masih minoritas secara jumlah, akan tetap menjadi basis konstituen yang sangat menentukan dalam Pemilu 2024. Hal ini terbukti perolehan suara Prabowo yang jauh melebihi ekspektasi di Pilpres 2019 meski menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada Pilpres 2014, modal elektoral Prabowo sangat besar. Pertama, ia didukung koalisi gemuk partai politik. Kedua, memiliki logistik melimpah, dan ketiga, dukungan media massa besar. Pada Pilpres 2019, Prabowo hanya didukung kekuatan politik dan logistik terbatas melawan Jokowi sebagai presiden petahana. Bahkan, dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Prabowo masih berhasil mengamankan 44,5% suara, turun kurang dari 3% jika dibandingkan dengan perolehan 2014 (46,8%). Jangan lupa fenomena menguatnya politik identitas yang mengkhawatirkan dan manuver beberapa aktor populisme Islam selama periode 2016-2019, membuat Jokowi akhirnya memilih Ma'ruf Amin sebagai pasangannya guna memoles citra Islam Jokowi. Tentu saja, mengandalkan dukungan semata-mata dari blok Islam populis ini, takkan mengantarkan pada kemenangan karena sebagian besar pemilih di Indonesia masuk kategori netral.

Sentimen populisme Islam dalam Pileg 2019 variasi dukungan terhadap populisme Islam lebih terlihat jelas di basis konstituen setiap partai. Menariknya, Golkar yang merupakan koalisi utama Jokowi memiliki basis massa yang cenderung propopulisme Islam. Skor rata-rata dukungan Islam populis di kalangan pemilih Golkar hanya sedikit di bawah pemilih Gerindra yang mencetak skor tertinggi dalam skala populisme Islam. Studi akademis menunjukkan bahwa basis pemilih Masyumi (partai Islam terbesar pada 1950-an) banyak yang bermigrasi ke Golkar setelah Masyumi dibubarkan Soekarno pada 1960 (Baswedan, 2004). Selain itu, jajaran kepengurusan Golkar juga masih didominasi tokoh-tokoh alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sejak era Akbar Tanjung. Dari data rekapitulasi perolehan suara KPU dan data survei, kami juga menemukan dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pilpres 2019 juga membuat mereka dihukum basis pemilih mereka. Terutama di beberapa basis tradisional Golkar, seperti Jawa Barat, Sumatra Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan. Di wilayah-wilayah itu, loyalis Golkar yang bersimpati dengan gerakan 212 sebagian mengalihkan suaranya ke Gerindra yang mengalami lonjakan suara. Gerindra berhasil meningkatkan perolehan suara pada 2019 (12,57%) dari perolehan suara 2014 (11,81%), menggeser Golkar sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP. Total perolehan suara Golkar pada 2019

(12,31%) mengalami penurunan yang signifikan dari perolehan suara 2014 (14,75%). Grafik 3 juga menunjukkan pemilih yang memiliki skor di bawah rata-rata dalam skala populisme Islam cenderung mendukung partai-partai yang lebih berorientasi sebagai partai nasionalis, yaitu Partai Demokrat, NasDem, PKB, dan PDIP. Grafik 3. Populisme Islam berdasarkan pilihan partai (Garis referensi ialah rata-rata total) .Tren populisme Islam dalam Pemilu 2024 Seiring dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke pemerintahan Jokowi sekarang, penting mengkaji sikap pemilih Prabowo serta Gerindra dan PAN apakah kecewa atau tidak dengan langkah tersebut.



Berdasarkan data survei terakhir dari beberapa lembaga survei yang kredibel, termasuk survei Indikator Politik Indonesia pada November 2021, ada indikasi kuat bahwa dukungan terhadap Prabowo (23,7%) menurun secara signifikan. Itu karena pemilih populis mulai bermigrasi dan mengalihkan dukungannya ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (15,1%). Islam populis, seperti mendapat idola baru pada diri Anies setelah Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi jilid kedua. Selain penting meneliti potensi migrasi dukungan basis populisme Islam, kita perlu juga mengkaji apakah pada Pemilu 2024 nanti, Islam populis masih sesolid seperti pada Pemilu 2019. Hal itu penting dilihat karena sejak pemenjaraan Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh populisme Islam yang lain. Kita tahu Pemerintahan Jokowi memakai pendekatan represif terhadap kelompok-kelompok populisme Islam. Termasuk dengan pembubaran FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang selama ini menjadi motor utama penggerak sentimen populisme Islam. Perdebatan yang muncul saat ini ialah apakah ‘hilangnya’ aktor populis karismatik untuk memobilisasi umat akan melemahkan sentimen populisme Islam di kalangan pemilih muslim. Atau, apakah hal tersebut justru akan melanggengkan grievances dan narasi marginalisasi, yang beredar di alam bawah sadar kelompok umat Indonesia, yang siap diaktifkan, dan dimanfaatkan kandidat populis Islam berikutnya, yang memasuki gelanggang elektoral dalam pemilihan mendatang. Jika aktivis Islam populis berhasil membingkai kejadian-kejadian terakhir sebagai bentuk penindasan politik, alih-alih sentimen populisme Islam akan meredup, yang terjadi justru rekonsolidasi gerakan yang punya efek elektoral yang signifikan pada 2024 nanti. Publik pun akan kembali menyaksikan kompetisi panjang yang melelahkan dan membelah. (<https://mediaindonesia.com>.)

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut faktor agama turut menentukan pemilih dalam pemilihan presiden maupun legislatif di Pemilu 2024. Faktor agama dinilai sudah menjadi hal terpenting dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat. Hasil temuan itu diperoleh dari serangkaian observasi sejak tahun 2021 hingga 2022 melalui survei nasional dengan sampel mencapai 8.319 responden. "Apakah itu di pemilihan presiden maupun legislatif. Bahkan itu menjadi faktor terpenting dari semua hal yang bisa memengaruhi perilaku publik dalam pemilihan presiden dan legislatif," kata Saiful (Tumpal Daniel, 2023). Saiful menjelaskan, hasil survei tersebut menunjukkan faktor agama dalam pemilihan presiden ada perbedaan signifikan secara statistik antara perilaku politik pemilih muslim dan non-muslim. SMRC menjadikan sosok Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai sampel uji coba. Data survei SMRC sejak tahun 2021 menunjukkan Anies cenderung dipilih oleh pemilih muslim dibandingkan non-muslim. "Adanya perbedaan itu penting riil ada di masyarakat bahwa orang muslim cenderung memilih Anies dibandingkan dengan non-muslim. Proporsinya 24 persen berbanding 17 persen. Demikian juga pada pemilih Prabowo yang muslim sebanyak 33 persen dan non-muslim ada 23 persen," jelasnya. Sementara pada Ganjar selisih proporsi pemilih muslim sebanyak 28 persen. Namun itu dinilai kecil lantaran adanya kecenderungan proporsi pemilih non-muslim lebih besar dibandingkan yang muslim. Ada 32 persen pemilih non-muslim yang mendukung Ganjar. Sedangkan pemilih non-muslim yang memilih Prabowo sebanyak 23 persen dan Anies ada 17 persen. Hal itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan mengakomodasi pemilih dari kalangan minoritas lebih besar pada Ganjar. "Artinya pada Ganjar kecenderungan mengakomodasi penganut agama minoritas lebih besar ketimbang pada pemilih muslim," ungkap Saiful.

Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin pula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007). Dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang.

Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. Menurut Agnes Heller dalam (Rahman, 2020) politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Jadi secara umum politik identitas dari berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan (Nasrudin, 2018).

Isu politik identitas dalam konteks perhelatan elektoral di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena ini diawali dengan blunder yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok ketika menyinggung Al Qur'an Surat Almaidah ayat 51, yang memicu reaksi umat Islam, khususnya di Jakarta (www.metro.tempo.co, 26 Desember 2017). Reaksi ini diikuti kemudian oleh demonstrasi besar 411 (4 November 2016) di depan Istana yang diikuti sekitar 200 ribu orang. Demonstrasi lebih besar digelar pada 2 Desember 2016 atau Aksi 212 dengan tuntutan Ahok nonaktif dari jabatan gubernur setelah dijadikan tersangka pada kasus penodaan agama. Peningkatan penggunaan politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terlihat jelas melalui pertengkaran antara massa pendukung Anies dan Ahok di berbagai platform media sosial dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contoh yang mencolok adalah beredarnya spanduk dengan narasi "larangan menyolatkan jenazah para pendukung Ahok" (www.metro.tempo.co, 25 Februari 2017). Fenomena politik identitas ini tidak hanya menjadi perhatian selama Pilkada DKI Jakarta 2017 tetapi juga berlanjut pada Pilpres 2019. Aspek identitas primordial, terutama agama dan etnisitas, menjadi titik tekan utama dalam elektoral tersebut.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas tampak mengemuka melalui berbagai bentuk ekspresi dan artikulasi. Semua bentuk ini dapat dilacak kembali pada identitas pembeda dua aspek primordial, yaitu agama dan etnis, yang melekat pada figur calon gubernur, khususnya Basuki Cahaya Purnama (Ahok, yang beragama Kristen dan beretnik Tionghoa) dan Anies Rasyid Baswedan (yang beragama Islam dan beretnik Arab). Kedua calon ini mewakili dua kutub identitas yang tidak hanya berbeda, tetapi juga berhadapan dalam situasi kontestatif. Dalam situasi kontestatif tersebut, kubu Anies "diuntungkan" dengan munculnya kasus penistaan agama oleh Ahok, yang awalnya mungkin tidak disengaja untuk menistakan agama Islam namun berkembang menjadi kasus penodaan agama dan

memicu aksi besar dari kelompok umat Islam, yaitu entitas 212 yang didukung oleh Ijtima Ulama. Aksi massa ini menuntut Ahok dipidana berdasarkan kasus surat Al Maidah 51 yang diikuti oleh jutaan umat Islam di Monas Jakarta. Kubu Anies mengkapitalisasi kasus ini untuk mobilisasi pemilih dan akhirnya berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena politik identitas yang menyulut kontroversi ini kembali terulang dan membesar selama dan sesudah Pilpres 2019.

Pasangan capres Jokowi-Ma'ruf, terutama Joko Widodo sebagai capres mendapat stigmatisasi melalui berbagai label identitas yang terus dikapitalisasi bahkan setelah Pilpres 2019 berakhir. Jokowi dituduh sebagai keturunan PKI, antek asing, anti-Islam, phobia terhadap Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT, dan sebagainya. Sementara itu, kubu Prabowo-Sandiaga juga disematkan dengan berbagai tuduhan stigmatisasi seperti ultranasionalis, Prabowo natalan, pendukung Islam radikal dan khilafah, dan sebagainya (Factsheet Politik Identitas, Puskapol UI, 2020). Semua isu yang dilekatkan kepada kedua kubu atau pendukungnya merupakan isu-isu untuk kepentingan elektoral. Melalui isu-isu tersebut, keduanya saling serang untuk meraih simpati publik dan pemilih, meskipun keduanya menolak tuduhan telah memanfaatkan dan mengkapitalisasi isu-isu identitas untuk kepentingan kemenangan pilpres tersebut.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menuduh kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan propaganda model Rusia dengan strategi "firehose of falsehood," yaitu menyebarkan kebohongan secara masif dalam kampanye secara berulang-ulang lewat media untuk memengaruhi pemilih. Serta memakai strategi "politic of fear" (politik ketakutan) dalam kampanye. Sebaliknya, kubu Prabowo-Sandiaga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf melakukan strategi "playing victim" terkait isu identitas dan kemudian mempraktikkan politik identitas dengan memilih seorang kyai sebagai calon wakil presiden. Kubu Prabowo-Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf menyebarkan tuduhan hoax untuk mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintahan Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang dikemukakan tim Prabowo-Sandiaga. Dampak saling serang dengan cara mengkapitalisasi isu-isu identitas sebagai faktor non-elektoral untuk meraih simpati dan memenangi kontestasi melahirkan kegaduhan dan pertengkaran di dalam masyarakat, baik di dunia digital maupun di kehidupan nyata sehari-hari. (Factsheet Politik Identitas, Puskapol UI, 2020). Situasi ini menyebabkan banyak kasus pertengkaran antara keluarga atau tetangga yang memiliki dukungan dan pilihan politik yang berbeda. Tebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan memengaruhi persepsi serta perilaku pemilih dari kedua kubu ini akhirnya membawa masyarakat Indonesia ke dalam situasi keterbelahan sosial-politik yang merata di berbagai daerah.

Bagaimana dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024. Masihkah isu politik identitas kembali mendominasi panggung politik, sebagaimana telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentunya hal tersebut menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat yang menganggap politik identitas merupakan salah satu penyebab hilangnya toleransi antar sesama. Hal tersebut diperkuat dari temuan data Litbang Kompas bahwa ada kekhawatiran akan hilangnya rasa toleransi di Pemilu 2024. Temuannya adalah, muncul sikap khawatir sebesar 53,5%, sikap sangat khawatir 16,4%, sikap sangat tidak khawatir 3,2%, serta sikap tidak tahu 2,6%. (Sumber Litbang Kompas, 8-10 November 2022).

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa 57,1% responden percaya bahwa politik

identitas akan menjadi faktor penting dalam Pemilu 2024. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 71,3% responden khawatir bahwa politik identitas akan memecah belah masyarakat Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada bulan Oktober 2022 menunjukkan bahwa 66,7% responden percaya bahwa politik identitas akan menjadi faktor penting dalam Pemilu 2024. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 72,4% responden khawatir bahwa politik identitas akan memecah belah masyarakat Indonesia. Kekhawatiran masyarakat terkait isu politik identitas semakin diperkuat dengan fenomena pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua pasangan ini memiliki basis pendukung yang berbeda, baik dari segi ideologi, program, maupun identitas. Anies-Amin cenderung mengukung politik identitas yang berbasis agama, yaitu Islam dan menggunakan diksi 'Amin', sedangkan Ganjar kedatangan membuat iklan layanan masyarakat dengan cara berwudhu pada waktu azan maghrib.

Antisipasi Polarisasi Ekstrem Pada Pilpres 2024

Menurut (Wicaksono, dkk, 2021) Konflik SARA akan terjadi jika politik identitas terjadi secara berlebihan, sehingga memiliki implikasi pada kualitas demokrasi Indonesia, utamanya pelaksanaan pemilu. Pertarungan politik, entah itu pemilu ataupun pilkada, jika bernuansa politik identitas juga akan mengarah pada populisme dengan sentimen agama. Konfrontasi antara dua kekuatan ekstrem politik identitas seolah meniadakan ruang moderasi dan jalan tengah yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir. Memilih salah satu pihak adalah kewajiban dan bersikap seolah pihak yang satunya pasti salah. Kondisi demikian tidak memberikan sisa bagi ruang dialog dalam ranah dinamika demokrasi, malah yang ada adalah saling benci, saling curiga, dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut (Mochtar, 2023) "Politik identitas di Indonesia sering menggunakan simbol dan diksi yang bersifat eksklusif dan provokatif. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi dan konflik di masyarakat." pernyataan tersebut diperkuat oleh (Ujang Komarudin, 2023) "Politik identitas sering menggunakan simbol-simbol agama, etnis, atau ras untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi demokrasi karena dapat memecah belah masyarakat." Dari hal tersebut memperkuat kenyataan atas fenomena munculnya kembali politik identitas pada pemilu 2024 seperti: Kasus penggunaan diksi "Amin" oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kasus penampilan Ganjar Pranowo di iklan adzan magrib berwudhu dan solat menunjukkan bahwa politik identitas dapat menjadi alat yang efektif untuk meraih dukungan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami politik identitas dan menolak penggunaan politik identitas yang memecah belah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Kasus yang berhubungan dengan politik identitas di Indonesia umumnya berhubungan dengan agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang di wakili oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia yang dulu adalah sebuah ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Itu makanya apabila diteliti lebih lanjut dari sejarah Indonesia, politik identitas yang ada di negeri ini pada umumnya berhubungan dengan isu-isu agama, etnis, dan politik (Widyawati, 2021). Situasi dan keadaan keterserakan identitas dan politik perbedaan tumbuh sangat subur dalam

negara atau masyarakat yang multikultural dan multi-etnis. Akibatnya, identitas suku dan agama menjadi hal yang terutama pada masyarakat bertipe macam ini.

Salah satu kondisi menguatnya kembali penggunaan isu-isu politik identitas pada Pemilu 2024 bilamana terjadi pilpres berlangsung dua putaran. Hal ini berangkat dari pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 antara Anis Baswedan-Sandiaga Uno vs Basuki Cahaya Purnama–Jarot Saeful Hidayat. Kemudian Pilpres 2019 saat berhadapan Jokowi-Maruf Amin vs Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Oleh karenanya urgensi pilpres berlangsung satu putaran mestinya bukan saja menjadi agenda dari setiap paslon pilpres 2024 yaitu untuk pasangan 01 Anies Rasyid Baswedan-Iskandar Muhaemin; Pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi harus menjadi agenda seluruh komponen bangsa, agar tidak berulang polarisasi ekstrem dengan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilpres dengan terciptanya keterbelahan masyarakat.

Kesimpulan

Secara umum politik identitas dari berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor yang membuat populisme agama dan isu politik identitas menjadi menarik dan muncul untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.

Kalaupun Pilpres 2024 yang kurang dari 48 hari lagi semenjak di awal tahun baru 2024 ini, tetap berlangsung dua putaran, mestinya semua komponen bangsa, yaitu penyelenggara dan peserta pemilu, juga pemerintah dan masyarakat, sedini mungkin mendeteksi segala kemungkinan dari arah dan dinamika populisme Islam dan potensi penggunaan isu-isu politik identitas harus diantisipasi dan diawasi secara seksama agar eskalasi polarisasi masyarakat terkendali. Bahwa latar belakang agama penting dalam pemilihan presiden itu benar, karena faktor latar agama turut menentukan pemilih dalam pemilihan presiden. Menurut Ujang Kamarudin, pengamat politik dari Universitas Parmadina mengatakan ‘faktor keagamaan menjadi hal penting dalam konteks pilih dan memilih. Pasalnya, ketika agama dijadikan frekuensi politik masyarakat maka itu merupakan hak dari pemilih."Ya bebas-bebas saja. Kita ini demokrasi, kalau agama dijadikan hal yang penting dalam menentukan pemilihan itu bagus. Terpenting agama tidak dipolitisasi itu yang tak boleh. Jangan agama dipolitisasi untuk kepentingan kelompok atau kekuasaan," tandasnya. (Tumpal Daniel, 2023)

Saran

1. Penyelenggara dan Pengawas Pemilu harus mewaspadaikan populisme agama dan isu politik identitas hanya dijadikan alat untuk mengkapitalisasikan kepentingan elektoral oleh aktor-aktor politik bila terjadi Pilpres 2024 dua putaran.
2. Antisipasi dan pencegahan penggunaan pengentalan populisme agama dan isu politik identitas pada Pilpres 2024 menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdillah S., Ubed. 2002. Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera
- Afala, L. M. (2008a). Politik Identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and ...*, July 2018.
- Afala, L. M. (2008b). Politik Identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and ...*, July 2018.
- Al- Farisi, L. S. (2018). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2.
- Asdrayany, Dessy., dkk. 2023. Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. *Journal on Education* Volume 06, No. 01
- Budiardjo Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu politik, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Chilcote, R. (1981). Theories of Comparative Politics: The search of Paradigm. Colorado: West View Press.
- Cressida Heyes. 2007. Identity Politic. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy
- Daniel, Tumpal, Partai Politik Islam Era Reformasi, YPTD, Jakarta, 2023
- Erilia, E. (2021). *Apa Saja Dampak Keberagaman Budaya di Indonesia?* Tirto.Id.
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama Dan Etnis Di Indonesia. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2). <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>
- Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia. *Universitas Mulawarman, Samarinda*, 1(March).
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
<https://mediaindonesia.com/opini/459669/populisme-islam-dan-lintasan-politik-jelang-2024>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2022). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4). <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>
- Indrawan, Jerry., dkk. 2023. Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024. UPN Veteran Jakarta. Vol. 14 No. 1, Juni 2023. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/8214/4524>
- Kurniawan, K. R. (2018). Dinamika Arsitektur Indonesia Dan Representasi 'Politik Identitas' Pasca Reformasi. *Nalars*, 17(1). <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.65-78>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12–16.
- Litbang Kompas, 8-10 November 2022.
- Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Masduqi, Irwan. 2011. Berislam Secara Toleran, Bandung: PT. Mizan Pustaka.

- Meleong, Lecxy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mentari, M., & Alunaza, H. (2022). Multikulturalisme dan Politik Identitas di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.810>
- Nasrudin, Juhana. 2018. Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47.
- Nego, O. (2020). Teologi Multikultural sebagai Respon terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2). <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109>
- Praselia, A. R. (2019). Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu. *Conference on Communication and New Media Studies*.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Rayu Mega Permatasari. (2022). Kedudukan Agama Di Era Globalisasi (Manajemen Keharmonisan Umat: Sebuah Pendekatan MultikulturalL). *Al-Manaj: Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah*, 1(2). <https://doi.org/10.56874/almanaj.v1i2.589>
- Rizqullah Naufan, M., & Hannase, M. (2021). Mendudukan Ulang Populisme Islam: Karakter Politik Identitas dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6). <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.256>
- Soedarsono, 2005, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi: penyelesaian sengketa hasil pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Konstitusi RI, Jakarta
- Strasser, S. (2021). Multikulturalismus. In *Lexikon der Globalisierung*. <https://doi.org/10.1515/transcript.9783839418222.270>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*/ Sugiyono. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco. (2015). Kebijakan Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, XXII(2).
- Survei SMRC: Agama Turut Jadi Penentu Pemilih dalam
[...https://www.voaindonesia.com/survei-smrc-agama-tur...](https://www.voaindonesia.com/survei-smrc-agama-tur...)
- Tempo.Co, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta”, 26 Desember 2017)
- Tempo.Co, “Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga”, 25 Februari 2017
- Tricahyono, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang : Trans Publishing,
- Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etns. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>
- Widyawati. (2021). Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2. 66-87. <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124.

Zahrotunnimah, Z. (2018). Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. *'ADALAH*, 2(10). <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i10.9437>